

# RANCANGAN

## CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA BNN, SEKJEN MPR RI DAN PLT. SEKJEN DPD RI

-----  
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/tanggal : Rabu, 4 Juli 2018.  
Waktu : Pukul 19.35 – 21.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala BNN, Sekjen MPR RI dan Plt Sekjen DPD RI dibuka pukul 19.35 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Satuan Tiga 2017;
- Realisasi Anggaran 2018;
- Penjelasan Permintaan Penambahan Anggaran

#### II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Plt Sekjen DPD RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Pemerintah menetapkan Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) DPD RI Tahun 2017 sebesar Rp.958.774.583.000,-, yang terbagi menjadi 2 (dua) Satker yakni Satker Dewan sebesar Rp.741.970.392.000,- dan Satker Setjen sebesar Rp.216.804.191.000.
  - Sampai dengan 31 Desember 2017, anggaran DPD RI telah direalisasikan sebesar Rp.918.608.692.168,- atau sekitar 95,81%, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

- Pemerintah telah menetapkan Pagu Alokasi (definitif) DPD RI Tahun 2018 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-162/MK.2/2017 tentang Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2018. Adapun besaran Pagu alokasi DPD RI Tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.082.392.940.000,- (satu triliun delapan puluh dua milyar tiga ratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Sampai dengan 31 Mei 2018, anggaran DPD RI telah direalisasikan sebesar Rp.405.225.837.144,- (empat ratus miliar dua ratus dua puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) atau sekitar 37,44% (tiga puluh tujuh koma empat puluh empat persen).
- Berdasarkan Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor B.214/M.PPN/D.9/PP.04.02/04/2018 Tanggal 18 April 2018 hal Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 telah ditetapkan Pagu Indikatif (PI) DPD RI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.087.118.025.000,- dengan rincian pagu per program, sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF 2019
1	Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	855.814.988.000
2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI	231.303.037.000
JUMLAH		1.087.118.025.000

- Jika dibandingkan dengan Pagu Definitif Tahun 2018, sebesar Rp.1.082.392.940.000,- terdapat kenaikan sebesar Rp.4.725.085.000,-
- Alokasi Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2019 belum dapat beberapa kegiatan prioritas terutama mengakomodir gaji, tunjangan, kegiatan terkait agenda ketatanegaraan, dukungan keahlian kepada DPD RI dan penyediaan sarana dan prasarana tahun 2019, antara lain yaitu:
  - a. Alokasi gaji, tunjangan, dan dukungan kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beserta staf pendukung (staf ahli dan asisten);
  - b. Alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana ruang kerja Anggota DPD RI Provinsi Kaltara di kantor DPD RI di ibu kota negara (renovasi kantor di ibukota negara);
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor DPD RI di Provinsi Kaltara;
  - d. Orientasi dan Sidang-sidang DPD RI akhir masa jabatan periode 2014-2019 dan Sidang DPD RI awal masa jabatan periode tahun 2019-2024;
  - e. Penyusunan laporan akuntabilitas anggota dan kelembagaan DPD RI periode 2014-2019; dan
  - f. Pembangunan kantor DPD RI di ibukota negara dan ibu kota provinsi dengan usulan anggaran sebesar Rp.836.468.018.800,-
- DPD mengusulkan penambahan pagu anggaran DPD RI Tahun 2019 melalui sebesar Rp. 915.664.626.120,- dengan ringkasan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI, PERTIMBANGAN, PENGAWASAN DPD RI, DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA DPD RI		
	Komite I	1 Kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi materi Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019	250.845.000
		2 Advokasi dan resolusi permasalahan daerah dalam lingkup Komite I	1.751.090.000
	PPUU	1 Penyusunan Usul Prolegnas DPD Tahun 2019-2024	1.562.125.000
		2 Penyusunan RUU Usul DPD RI	2.323.875.000
		3 Harmonisasi Pembulatan Pemantapan Konsepsi RUU	2.801.300.000
		4 Workshop Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	312.700.000
	BKSP	1 Forum-forum Relevan Keparlemenan	3.212.200.000
		2 Kerjasama Bilateral Parlemen	1.847.302.000
		3 Kegiatan Pertemuan dengan Gubernur, Bupati/Walikota dalam rangka Pembahasan Potensi Daerah	1.550.666.500
	BPKK /PANITIA URUSAN LEGISLASI DAERAH	1 Pemantauan Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA)	2.813.130.000
		2 Penyusunan Pandangan, Pendapat, dan Rekomendasi DPD RI atas Rancangan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah (5 Kelompok Bidang Perda) yaitu : a. Perda tentang Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah; b. Perda tentang Perencanaan Anggaran Daerah; c. Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;	17.319.990.000

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
		d. Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Lainnya; dan e. Perda tentang Perekonomian dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
		3 Penyusunan Peta Permasalahan Hukum di Daerah	2.041.695.000
2	PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI, PERTIMBANGAN, PENGAWASAN DPD, DAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH OLEH ANGGOTA DPD RI		
	PANMUS	1 Kegiatan Orientasi Calon anggota DPD RI Periode 2019-2024	3.712.399.000
		2 Penyusunan Renstra DPD RI Tahun 2019-2024	1.856.199.500
	Komite II	3 Penyusunan Evaluasi Hasil Kerja Alat Kelengkapan DPD RI Periode 2014-2019	594.680.000
	Dukungan Kegiatan ASMASDA Anggota Provinsi Kalimantan Utara	1 Kegiatan Reses	2.759.040.000
		2 Kegiatan Kunker Perorangan	485.760.000
		3 Kegiatan Kehumasan/Publikasi/ Pemberitaan (Publikasi Kegiatan Anggota DPD RI Melalui Media Massa dan Sarana Publikasi Lainnya)	552.000.000
		4 Kegiatan Pertemuan/Jamuan/ Konsultasi Anggota DPD dengan Unsur Masyarakat Daerah dan Konstituen	80.000.000
4	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN HUKUM	1 Pendampingan Penyusunan RUU Usul inisiatif DPD RI	890.994.500
		2 Penguatan Kelembagaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah	865.945.000
5	PENGKAJIAN ASPIRASI	1 Bimbingan Teknis Pengoperasian SI ASMASDA	1.646.850.000

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
	MASYARAKAT DAN KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH	kepada Staf Ahli Anggota DPD RI Periode 2019 - 2024	
		2 Integrasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi ASMASDA dan Sistem Informasi Usulan Program Prioritas Daerah	2.164.650.000
6	PENGELOLAAN KEUANGAN KEANGGOTAAN DPD DAN OPERASIONAL PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT	1 Kegiatan Purna Tugas Anggota DPD RI Periode 2014-2019	4.620.000.000
		2 Gaji & Tunjangan Anggota DPD RI termasuk Staf Ahli dan Asisten Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Utara.	1.746.053.320
7	PENATAUSAHAAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA, KEANGGOTAAN, DAN ADVOKASI HUKUM	1 Sidang Akhir Masa Jabatan DPD Periode 2014 – 2019;	640.000.000
		2 Persiapan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPD RI;	115.400.000
		3 Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2019-2024 .	180.000.000
		4 Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPD	4.219.853.000
		5 Pengembangan Kompetensi bagi Staf Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi (dilaksanakan di Kantor DPD RI)	407.520.000
8	PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	1 Honorarium Staf Administrasi di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Kaltara;	33.000.000
		2 Honorarium Petugas Pengamanan di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Kaltara;	28.200.000
		3 Transport Staf Administrasi dan Petugas Pengamanan di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Kaltara.	12.000.000
		4 Penyusunan Renstra Setjen DPD RI 2019-2024	1.856.199.500
9	PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, RISALAH DAN DOKUMENTASI	1 Pencetakan buku-buku DPD dalam rangka Sidang Akhir Masa Jabatan DPD RI Periode 2014-2019;	1.920.000.000
		2 Publikasi dan dokumentasi Sidang Akhir Masa Jabatan DPD Periode 2014 – 2019.	2.000.000.000
		3 Pengadaan <i>Access Switch</i>	500.000.000

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
10	PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN MEDIA	1 Kegiatan Peliputan/Penyajian Data dan Informasi/Dokumentasi Foto dan Audio Visual;	2.411.200.000
		2 Pengadaan dan Pemeliharaan alat Media Visual	691.695.000
11	PENYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM SARANA DAN PRASARANA DPD RI	1 Pembangunan Gedung/Kantor DPD RI di Ibukota Negara	557.299.038.800
		2 Pembangunan Gedung/Kantor DPD RI di 25 Provinsi (Kantor Daerah)	279.168.980.000
		3 Layanan Perkantoran - Sidang Paripurna Mendengarkan Pidato Nota Keuangan atau Pidato Kenegaraan Presiden	1.210.000.000
		4 Layanan Perkantoran - Dukungan Perlengkapan Kegiatan Refleksi Akhir Tahun	1.700.000.000
12	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Audit Fungsional Kantor DPD RI di Ibukota Provins	967.630.000
13	PENYELENGGARAAN DUKUNGAN TEKNIS DAN KEAHLIAN DPD RI DI DAERAH PEMILIHAN	1 Layanan Internal ( <i>Overhead</i> ) Peralatan dan Mesin	106.000.000
		2 Kegiatan Operasional Kantor Sementara DPD RI di Ibukota Provinsi Kaltara	436.420.000
<b>Jumlah Usulan Penambahan Pagu DPD RI Tahun 2019</b>			<b>915.664.626.120</b>

2. Beberapa hal yang disampaikan Sekjen MPR, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-269/MK.02/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, MPR memperoleh pagu indikatif sebesar Rp. 958.397.255.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Pagu Indikatif MPR tersebut untuk membiayai 2 (dua) program yaitu :
    1. Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 793.684.766.649,- Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai Kegiatan MPR dan alat kelengkapannya.
    2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR sebesar Rp. 164.712.488.351,- Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai kegiatan teknis dan administrasi bagi Sekretariat Jenderal MPR.
  - Alokasi anggaran sidang yang diberikan belum mengakomodir seluruh rangkaian sidang, sehingga MPR masih memerlukan tambahan anggaran.

- Dari Pagu Indikatif yang diperoleh MPR tahun 2019 tersebut, belum dapat membiayai seluruh kegiatan MPR terutama terkait dengan tambahan 3 orang Pimpinan, kegiatan yang berbasis anggota dan kegiatan sidang 5 tahunan. Pada kesempatan ini MPR mengajukan tambahan anggaran pada pagu alokasi tahun 2019 sebesar Rp. 350.407.309.967,- (tiga ratus lima puluh milyar empat ratus tujuh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang di alokasikan untuk :
  1. Tambahan pada Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya sebesar Rp. 327.616.451.976,- (tiga ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai penambahan kegiatan :
    - a. Gaji dan Tunjangan 3 orang Pimpinan
    - b. Kegiatan 3 orang Pimpinan
    - c. Gaji Tenaga Ahli
    - d. Rapat Panitia Ad Hoc II
    - e. Tambahan 2 kali Sosialisasi oleh Anggota MPR RI di Daerah Pemilihan
    - f. Seminar fraksi sebanyak 44 kali,
    - g. Dengar Pendapat dengan Masyarakat oleh Anggota MPR sebanyak 4 kali
    - h. Penyerapan Aspirasi Masyarakat
  2. Tambahan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR sebesar Rp.22.790.858.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai :
    - a. Ajudan, pengemudi dan asisten rumah untuk 3 orang Pimpinan Baru
    - b. Pengadaan LED Indoor dan penggantian Delegate Confrence system Gedung Nusantara untuk mendukung pelaksanaan sidang.
- 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNN, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif K/L dan Rancangan Awal RKP 2019, BNN mendapat pagu sebesar Rp1.509.378.128.000,- (satu triliun lima ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode	Program	Pagu Indikatif (Rp)
1.	066.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	908.225.044.000
2.	066.01.06	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	601.153.084.000
<b>Total Pagu Indikatif BNN TA. 2019</b>			<b>1.509.378.128.000</b>

- Setelah dilakukan penajaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran BNN tahun 2019 dengan memperhatikan (a) alokasi Proyek Prioritas Nasional, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (belanja pegawai operasional dan belanja

barang operasional), (b) *baseline* tahun 2019, dan (c) hasil kesepakatan pertemuan *Trilateral Meeting* I antara BNN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Mei 2018, maka disusun Rencana Kerja BNN Tahun 2019 yang mengambil tema “Meningkatkan Kapasitas Organisasi dalam Rangka Memperluas Layanan Publik P4GN” dan mengarahkan fokus pada :

1. Pembangunan infrastruktur layanan publik BNN;
2. Upaya peningkatan reformasi birokrasi BNN;
3. Peningkatan kapasitas SDM BNN; dan
4. Pemenuhan belanja operasional pegawai BNN (001) dan belanja operasional barang 21 BNN Kabupaten/Kota baru.

Dengan rumusan anggaran per program sebagai berikut :

No.	Kode	Program	Pagu Indikatif Penyesuaian (Rp)
1.	066.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	938.388.550.000
2.	066.01.06	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	570.989.578.000
<b>Total Pagu Indikatif BNN TA. 2019</b>			<b>1.509.378.128.000</b>

- Dari total anggaran tersebut sebagian dialokasikan untuk mendanai Proyek Prioritas Nasional BNN TA. 2019, sebagai berikut:

No.	Proyek Prioritas Nasional	Target	Alokasi (Rp)
1.	Kajian Pencegahan Penyalahgunaan Prekursor Narkotika dalam Sektor Farmasi dan Non-Farmasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
2.	Riset Kesehatan Dampak Narkoba	1 Laporan Riset	1.500.000.000
3.	Survey Nasional Penyalah Guna Narkoba 2019	1 Laporan Survey	9.200.000.000
4.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Uji Narkoba Pusat	49 Unit	37.000.000.000
5.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Uji Narkoba Daerah	2 Unit	5.000.000.000
6.	Pengembangan Model Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	1 Model	3.000.000.000
7.	Kajian Model-model Intervensi Sosial Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 Rekomendasi Model	1.000.000.000
8.	Peningkatan Kapasitas Relawan Anti Narkoba	150 Orang Relawan	3.750.000.000
9.	Pelaksanaan Pilot Project Alternative Development	1 Laporan Pelaksanaan	2.954.000.000
10.	Pengembangan Model Pendidikan Anti Narkoba Untuk Kalangan Remaja	1 Model	2.000.000.000
11.	Peningkatan Kompetensi Petugas Rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN	150 Orang Petugas	4.700.000.000



12	Pengembangan Sistem Komando Operasi Interdiksi Terpadu	1 Sistem	20.000.000.000
13	Pembangunan Pos Komando Interdiksi Terpadu	7 Pos	30.000.000.000
14	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba	615 Berkas Perkara	52.223.000.000
15	Penyelidikan dan Pemusnahan Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	12 Titik Lokasi	5.424.000.000
16	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	43 Berkas Perkara	20.621.000.000
<b>Total</b>			<b>199.372.000.000</b>

- Disamping itu Proyek Prioritas KL BNN TA. 2019, sebagai berikut:

No.	Proyek Prioritas KL BNN	Target	Alokasi (Rp)
1.	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Restrukturisasi Organisasi	1 Dokumen	1.000.000.000
2.	Pembangunan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pegawai	1 Paket	1.000.000.000
3.	Pembinaan Unit Vertikal oleh Tim Terpadu Lintas Fungsi	5 Lokasi	2.000.000.000
4.	Pelaksanaan Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundangan	2 Laporan	800.000.000
5.	Operasional Program Kelompok Kerja Pengelolaan K9	12 Bulan	3.182.000.000
6.	Peningkatan Kapasitas Penggiat dan Kader Pemuda Anti Narkoba di wilayah proyek percontohan <i>Alternative Development</i>	120 Penggiat	1.250.000.000
<b>Total</b>			<b>9.232.000.000</b>

- Penyesuaian Alokasi Belanja Operasional 2019 sebagai berikut:

<b>Realokasi Belanja Operasional 2019</b>		
Belanja Pegawai	Belanja Barang	Total
476.590.281.000	317.504.940.000	794.095.221.000

- BNN mengajukan tambahan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.456.908.745.000,- (*Satu Triliun Empat Ratus Lima puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang belum mendapatkan alokasi pada Pagu Indikatif Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kebutuhan	Anggaran (Rp)
-----	-----------	---------------

1.	Pengadaan Instrumen <i>Video Conference</i> (Pusat dan 34 BNN Provinsi)	48.857.788.000
2.	Pengembangan Sistem Pelayanan <i>Contact Center</i> (34 BNN Provinsi)	17.530.000.000
3.	Pengembangan Sarana dan Prasarana <i>Center of Excellence</i> (1 Unit)	18.000.000.000
4.	Pengadaan Mobil Sosialisasi Diseminasi Informasi (50 Unit)	27.418.908.000
5.	Pengadaan Kendaraan Fungsional Pemberdayaan Masyarakat (34 Unit)	25.644.402.000
6.	Pengadaan Mobil Tahanan (8 Unit) dan <i>Incenerator</i> (4 Unit)	10.800.000.000
7.	Pengadaan Mobil Operasional Penindakan dan Pengejaran (34 Unit)	30.600.000.000
8.	Pengadaan <i>Tactical Equipment</i> (5 Paket)	26.320.471.000
9.	Pengadaan <i>Direction Finder</i> (11 Unit)	220.069.610.000
10.	Pengadaan Intelijen <i>Tool Kits (GPS Tracking with Magnetic Installation)</i>	500.000.000
11.	Pengadaan Amunisi Senjata <i>Cal 9x21mm</i> (350.000 Butir )	2.030.000.000
12.	Pembangunan Gedung BNN Pusat (1 Unit)	520.000.000.000
13.	Pembangunan Gedung BNN Provinsi (6 Unit)	90.000.000.000
14.	Pembangunan Gedung BNN Kabupaten/Kota (13 Unit)	65.000.000.000
15.	Belanja Pegawai Tambahan (1.280 Personil)	32.947.937.000
16.	Pengadaan Sarana-Prasarana Kantor BNN Provinsi Jawa Timur	5.648.533.000
17.	Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Fungsional Peberdayaan Masyarakat	933.096.000
18.	Dukungan Layanan Kediklatan (Peningkatan Kapasitas ASN BNN)	13.000.000.000
19.	Dukungan Layanan Pascarehabilitasi	10.000.000.000
20.	Dukungan Kegiatan P4GN Lainnya termasuk 21 BNNK Baru	291.608.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.456.908.745.000</b>

- Beberapa usulan yang menjadi prioritas BNN adalah :
  - a. Pengadaan Instrumen *Video Conference* (Pusat dan 34 BNN Provinsi)
  - b. Pengembangan Sarana dan Prasarana *Center of Excellence* (1 Unit)
  - c. Pengadaan *Direction Finder* (11 Unit)
  - d. Pengadaan Amunisi Senjata *Cal 9x21mm* (350.000 Butir )
  - e. Belanja Pegawai Tambahan (1.280 Personil)
  - f. Pengadaan Sarana-Prasarana Kantor BNN Provinsi Jawa Timur
  - g. Dukungan Layanan Kediklatan (Peningkatan Kapasitas ASN BNN)
  - h. Dukungan Kegiatan P4GN Lainnya termasuk 21 BNNK Baru
- Realisasi BNN T.A. 2017 sebesar 90,6%, Realisasi BNN T.A. 2018 sampai dengan 2 Juli 2018 sebesar 33,7%

2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meminta mitra kerja yang lain untuk menyerahkan satuan 3 T.A. 2017 seperti BNN sebagai bagian dari pengawasan Komisi III. Bahwa sesuai dengan UU MD3 bahwa APBN maupun UU APBNP setelah 30 hari di sahkan maka satuan 3 disampaikan kepada DPR.
  - Bahwa ada beberapa kementerian dan lembaga yang dalam melakukan sosialisasi melibatkan anggota DPR RI. Hal ini efektif karena anggota DPR memiliki basis massa. Meminta BNN dalam melakukan sosialisasi melibatkan anggota Komisi III
  - Meminta penjelasan kepada DPD, terkait dengan persoalan usulan tambahan Rp.915 Milyar guna pembangunan gedung di pusat dan daerah merupakan usulan baru atau usulan yang sudah disetujui.
  - Meminta penjelasan kepada BNN terkait dengan persoalan tambahan anggaran *direction finder* dan pengadaan Pengadaan Intelijen *Tool Kits (GPS Tracking with Magnetic Installation)*, apakah ini sesuatu yang sama. Meminta penjelasan terkait dengan pro PN dan Pro KL dalam paparan Kepala BNN.
  - Bahwa selama ini Tidak pernah membaca satuan 3 dari mitra, padahal aturannya dalam UU APBN adalah 30 hari setelah di sahkan maka satuan 3 diserahkan ke komisi sebagai bagian dari pengawasan. Meminta agar BNN melibatkan Komisi III dalam sosialisasi diberbagai daerah.
  - Bahwa anggaran BNN sebenarnya masih kurang jika melihat beban kerjanya. Bahwa dukungan anggaran pasca rehabilitasi masih kurang memadai sehingga masalah narkoba dan *over capacity* tidak pernah selesai. Diharapkan ada perbaikan anggaran untuk pasca rehab, dan diharapkan pembentukan BNNK dianggarkan karena kasus narkoba di kabupaten cukup signifikan.
  - Meminta agar kegiatan Tomas di MPR dikembalikan lagi menjadi 6x khusus untuk Komisi III.
  - Disampaikan agar anggota Komisi III dilibatkan dalam sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan BNN. Diusulkan agar anggota yang melakukan sosialisasi 4 pilar bisa diberikan uniform
  - Meminta penjelasan kepada BNN terkait dengan persoalan usulan kebutuhan dimana ada *political will* dari Kepala BNN untuk memberantas narkoba seperti pada poin 11 yaitu pengadaan amunisi namun anggarannya kecil.
  - Bahwa anggaran mitra sangat konservatif, tanpa ada lompatan-lompatan baru. Bahwa peredaran narkoba sudah sampai ke desa desa. Bahwa asal narkoba dari Malaysia dan China sehingga meminta BNN menelisik lebih dalam soal muatan politik untuk menghancurkan generasi muda. Bahwa jaringan pesantren bisa diberdayakan untuk sosialisasi anti narkoba.
  - Bahwa hasil rapat dengar pendapat ini akan menjadi bahan untuk pandangan Fraksi-fraksi
3. Beberapa penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Mitra kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Kepala BNN menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi BNN banyak dan akan melibatkan anggota Komisi III DPR RI. Pro PN adalah Program Prioritas Nasional dan Pro KL adalah Program Prioritas Kementerian Lembaga. Bahwa *direction finder* bisa berbentuk portabel. Pasca rehab cukup berat sehingga BNN fokus bagaimana agar para pengguna pasca di rehab bisa memiliki penghasilan sehingga ada kegiatan workshop saat rehab.

- Sekjen MPR menyampaikan bahwa satuan 3 T.A. 2018 akan segera diserahkan. Terkait dengan sosialisasi Tomas, jika usulan anggaran disetujui maka setiap anggota Komisi III dapat 14x sedangkan anggaran yang sudah exist sebanyak 8x dalam setahun. Terkait persoalan uniform sedang dipersiapkan. Soal pembangunan gedung merupakan usulan baru.

Rapat ditutup pukul 21.00 WIB